

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN POTENSI  
BANJIR DI KOTA MALANG**

**(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)**

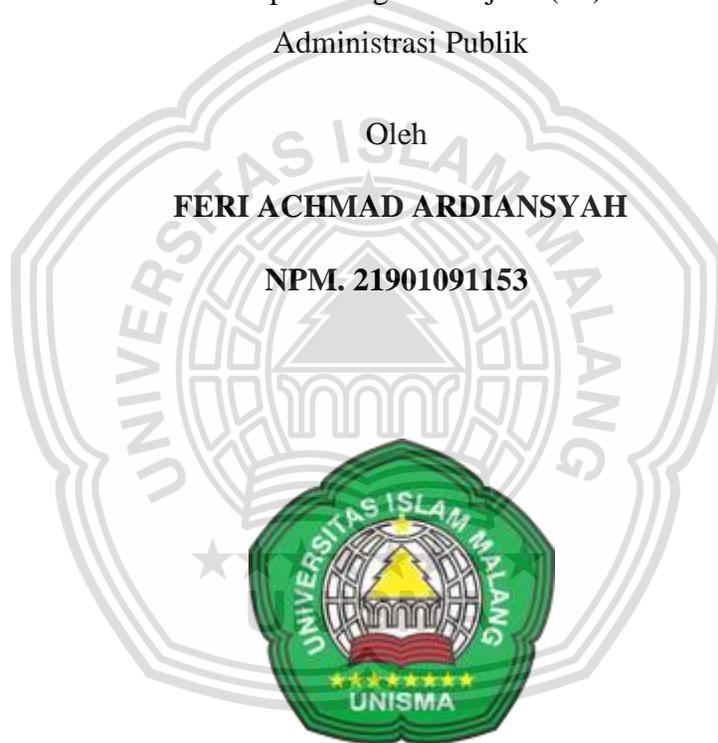
**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana (S1)  
Administrasi Publik

Oleh

**FERI ACHMAD ARDIANSYAH**

**NPM. 21901091153**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2024**

1

## RINGKASAN

Feri Achmad Ardiansyah, 2024, NPM 21901091153, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang” (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang). Dosen Pembimbing (1) Dr. Hayat, S.AP., M.Si (2) Taufiq Rahman Ilyas, S. AP., M. AP

---

Penelitian ini membahas tentang peran Collaborative Governance dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan banjir di beberapa titik Kota Malang yang belum teratasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian ini menunjukkan tugas-tugas dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi bencana terbilang cukup baik. Disisi lain, pada hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya banjir yang bukan hanya dari faktor alam namun juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, penghambat penanggulangan banjir yang ada juga dikarenakan faktor keterbatasan dana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya ego sektoral.

***Kata Kunci : Collaborative Governance, Penanggulangan Potensi Banjir***

## SUMMARY

*Feri Achmad Ardiansyah, 2024, NPM 21901091153, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, "Collaborative Governance In Flood Risk Management In Malang City (Study at Badan Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang). Supervisors: (1) Dr. Hayat, S.AP., M.Si (2) Taufiq Rahman Ilyas, S. AP., M. AP*

---

*This research discusses the role of Collaborative Governance in overcoming potential floods in Malang City. This research is motivated by the many flooding problems in several points in Malang City that have not been resolved. The aim of this research is to examine the role of Collaborative Governance in flood management in Malang City. The method used in this research is qualitative method. The informants in this research were the Regional Disaster Management Agency and the surrounding community. The results of this research show that the duties and responsibilities of the Regional Disaster Management Agency in dealing with disasters are quite good. On the other hand, the research results found that the factors that cause flooding are not only natural factors but also a lack of public concern for the environment. Apart from that, existing obstacles to flood management are also due to limited funds, lack of public awareness, and the existence of sectoral egos.*

***Keywords : Collaborative Governance; Management Of Potential Flooding***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Iklm di Indonesia dicirikan oleh cuaca tropis. Secara umum, Indonesia mempunyai iklim yang relatif hangat, panas dan lembab sepanjang tahun. Sehingga, Indonesia hanya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pasokan air di Indonesia cukup panas untuk menjaga suhu tetap stabil. Perubahan musim di Indonesia tidak terlalu signifikan. Curah hujan merupakan penentu utama cuaca di Indonesia, terlepas dari suhu atau kualitas udara. Beberapa kota di Indoneisa, telah dilanda hujan deras yang menyebabkan banjir yang meluas.

Istilah bencana digunakan untuk menggambarkan bencana alam yang terjadi akibat tindakan manusia atau alam, yang berdampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana adalah serangkaian kejadian yang menimbulkan bahaya dan risiko yang mengancam kehidupan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Bencana banjir telah mengakibatkan kerugian harta benda, kendaraan dan masalah lain sesuai dengan peraturan UU tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana sebagai landasan hukum penanggulangan bencana. Namun, meskipun undang-undang ini menguraikan cara-cara yang dapat digunakan untuk memberantas kejatahun akan tetapi masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya yang perlu diperhatikan.

Fenomena banjir memang telah sering terjadi di setiap daerah di Indonesia, terlebih lagi kita tinggal di kawasan perkotaan Kota Malang yang merupakan bagian kawasan daerah Indonesia. Dimana saat musim hujan terjadi di Indonesia, maka di berbagai wilayah Indonesia akan terdengar berita tentang terjadinya banjir. Khususnya banjir yang terjadi di Kota Malang yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan pemukiman yang padat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga non-pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah regional/kota di bawah pembinaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tanggung jawab ini dikelola oleh BPBD, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Pemerintah Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB Kota Malang mengumpulkan informasi kejadian kecelakaan yang terjadi di beberapa daerah/kota, hingga tahun 2020 terdapat 4650 bencana yang terjadi di daerah/kota Malang. Disusul dengan peningkatan sebesar 16,2% pada tahun berikutnya, pada tahun 2021 menjadi 5.402 kejadian dan penurunan menjadi 3.544 bencana pada tahun 2022 (Prayetno, 2022).

Dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian terjadinya banjir adalah Kota Malang yang memiliki penduduk sekitar 846.130 jiwa. Yang mana kawasan perkotaan merupakan kawasan yang padat penduduk dimana, Kota Malang banyak penduduk bermigrasi dari luar daerah seperti mahasiswa dan para pekerja yang ada di Kota Malang. Akibat semakin tingginya penduduk yang bertempat tinggal di Kota Malang berakibat arus urbanisasi semakin meningkat maka dari itu konsekuensi yang

ditimbulkan dengan meningkatnya akan ruang untuk mengakomodasikan struktur fisik yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya diikuti dengan perkembangan kota menyebabkan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan berakibat pada kerusakan ekosistem sumber daya alam yang ada, seperti berkurangnya lahan hijau, rusaknya lingkungan, sehingga tidak ada daerah resapan air bahkan mengakibatkan dampak meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dari bulan November hingga Februari 2023, Indonesia akan mengalami musim hujan dengan tingkat tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari di tahun yang sama. Kota Malang memiliki curah hujan berkisar antara 51-150 mm yang menunjukkan tingkat curah hujan yang rendah (BMKG Jawa Timur, 2023). Kota Malang dilanda banjir pada musim hujan, tempat terjadinya banjir ini sudah 20 tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2003 Kota Malang terkena dampak banjir dan semakin meningkat sejak 5 tahun terakhir.

Terhitung sejak 2019 lalu Kota Malang sendiri telah terjadi fenomena banjir sebanyak 700 kali banjir di seluruh kecamatan. Pada bulan November sampai dengan Februari 2023, Indonesia akan mengalami musim hujan yang diperkirakan dapat meningkat sepanjang tahun. Jumlah curah hujan di Kota Malang biasanya antara 51-150 mm, yang dianggap kategori rendah. Musim hujam ini menyebabkan banjir di sebagian wilayah di Kota Malang. Pada tahun 2022 BPBD Kota Malang mencatat ada 18 kejadian banjir bahkan terparahnya ketinggiannya mencapai 50 cm di wilayah Danau Toba dan Ranugrati, Kedungkandang. Bahkan pada 2022 BPBD Kota Malang

mencatat 211 kejadian banjir. Lalu pada 2023 sekitar Maret, 17 titik Kota Malang kembali diterjang banjir dan salah satunya ada di wilayah Belimbing (Ahmad adi,2023).

Jika volume air terus bertambah, maka seluruh tempat atau daerah akan terendam air, yang disebut dengan banjir. Hal ini terutama menjadi permasalahan bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Situasi ini dapat memburuk jika tidak dikendalikan, yang mengakibatkan kerusakan kawasan dan infrastruktur di kota-kota besar Kota Malang.

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu meningkatkan sistem drainase di area yang rentan terhadap banjir dengan cara membersihkan saluran air, memperbaiki saluran yang rusak dan membuat perencanaan pembangunan drainase yang lebih efektif. Selain itu BPBD melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, memberikan informasi terhadap masyarakat tentang bagaimana mengurangi resiko banjir seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghindari saluran air.

Banjir jenis ini disebabkan oleh penurunan struktur tata ruang yang berujung pada meningkatnya masalah banjir akibat curah hujan yang berlebihan. Kota Malang merupakan salah satu kota yang terkena bencana tanah longsor, hal ini disebabkan berkurangnya daerah pengambilan dan resapan air, serta berkurangnya ruang terbuka hijau sehingga mengakibatkan terjadinya banjir.

Pola ruang yang dinilai tidak tertata dengan baik menjadi penyebab Kota Malang belum memiliki ruang terbuka hijau khususnya kawasan dengan daya serap air

yang mumpuni untuk daya serap air sehingga mengurangi terhadap terjadinya genangan air. Masih banyak wilayah yang seharusnya menjadi lahan terbuka untuk daya serapan air menjadi lahan pemukiman seperti, perumahan, pertokoan dan lembaga pendidikan. Banjir di Kota Malang sendiri sering terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Malang seperti wilayah sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Jalan Soekarno Hatta, Kampung Kayutangan, dan Kecamatan Sukun.

**Gambar 1.1 personel PPDB Kota Malang melakukan asesmen**



Sumber : Website PPDB Kota Malang

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya genangan air yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi yang melanda Kota Malang. Yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah perumahan Sigura-gura Residence di wilayah kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun (PPDB Kota Malang). Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa tempat yang tergenang oleh air merupakan pemukiman padat penduduk, dimana pemukiman yang tidak ada ruang terbuka hijau untuk daya resapan air, serta kerapatan bangunan dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya curah hujan yang tinggi sehingga volume air yang terus

bertambah dan mengakibatkan terjadinya banjir yang seringkali terjadi setiap musim penghujan di beberapa kawasan Kota Malang.

Pemerintah Kota Malang harus berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap keadaan darurat, yang melibatkan perkiraan secara tepat apa yang akan dilakukan jika terjadi bencana juga dapat menurunkan angka korban. Selain itu, BPDB Kota Malang juga telah membentuk pos lapangan yang ditempatkan di lima kecamatan dengan 50 personil. Tentunya pada tiap pos yang berada di tim ini juga telah dilengkapi oleh berbagai peralatan, seperti tenda untuk dapur umum, helm, pelampung dan lainnya untuk mencegah terjadinya korban saat adanya terjadi banjir.

Menurut Kepala penanggulangan Bencana Drs. Prayitno, MAP 2023 BPDB Kota Malang mengungkapkan “akan meluncurkan aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana, kerugian dan potensi bencana yang terjadi di kawasan tempat tinggal mereka”. Salah satu proses yang digunakan dalam manajemen bencana didasarkan pada kesiapsiagaan bencana dan memperlakukan semua kegiatan yang melibatkan perencanaan dan manajemen sebelum, selama atau setelah bencana sebagai bagian dari persiapan bencana.a (Purnomo, 2010)

Konsep *collaborative governance* melibatkan penggunaan proyek oleh masing-masing unit menetapkan tujuan, mengevaluasi hasil dan membuat perubahan. Ada tiga aspek, pertama yaitu proyek tersebut harus dimulai oleh seorang pemain yang menunjukkan keinginan yang jelas untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Kedua, masing-masing stakeholder dan lembaga mitra harus dilibatkan dalam menentukan

tujuan. Ketiga, komunikasi antara lembaga-lembaga yang terlibat harus bersifat strategis, sedemikian rupa sehingga setiap organisasi dan organisasi lainnya memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan dalam menanggapi transparansi (Donahue dalam Sudarmo, 2011).

Lembaga publik seperti pemerintahan bertanggung jawab untuk mendefinisikan kebijakan. Saat ini, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan di antara para *stakeholder* kebijakan melalui kolaborasi. *Collaborative governance* yang partisipatif dan penerapan keadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata kelola partisipatif menjadi pemerintahan kolaboratif yang melibatkan langsung pemangku kepentingan di dalam dan di luar pemerintahan pada rangka menciptakan, melaksanakan kebijakan dan program publik.

Dalam penanggulangan banjir ini semua pihak harus ada kerja sama dari berbagai pihak agar perencanaan penanggulangan banjir bisa terwujud dalam mengurangi potensi terjadinya banjir, dalam hal ini konsep *collaborative governance* merupakan solusi kerjasama antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada konsep *collaborative governance* peran masing masing pihak sangat dibutuhkan. Pertama, Pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur berbagai pelaksanaan penanggulangan bencana, sebagai penggerak melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang efektif kepada masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, sebagai fasilitator dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam penanggulangan banjir yang dibutuhkan oleh publik dalam mengurangi genangan air.

Sementara itu, Hayat (2013:32) mengungkapkan bahwa *good governance* adalah barometer dari penilaian kinerja pelayan publik. Kinerja pegawai pemerintahan diukur dengan ukuran tata kelola pemerintahan yang baik. Pekerjaan pegawai yang berkualitas dan kompeten akan berdampak positif pada layanan yang diberikan. Kedua, Swasta dapat menyediakan dana untuk proyek-proyek penanggulangan banjir, baik melalui investasi langsung maupun melalui kemitraan publik-swasta. Selain itu, peran swasta dalam penanggulangan banjir dengan mengimplementasikan teknologi dan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Ketiga, Masyarakat berperan sebagai pemberi informasi bencana terhadap instansi BPBD guna melakukan upaya penanggulangan banjir. Disamping itu berpartisipasi turun lapangan membantu BPBD dalam membersihkan saluran air dan memperbaiki saluran yang rusak.

Masyarakat menjalankan kewenangan atas layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat negara. Pekerjaan layanan publik adalah hak asasi manusia yang fundamental dan mencakup semua manfaat yang menyertainya, termasuk kondisi di mana layanan diberikan (Hayat,2018). Penanganan banjir di Kota Malang memerlukan penanganan terpadu, karena memerlukan kerja sama dari *Collaborative governance* untuk mengawasi keadaan tersebut. Selain itu, pengelolaan banjir dapat menghadirkan perspektif baru yang dapat mengarah pada pengembangan fungsi atau inovasi baru.

Pemerintah kota Malang harus mempunyai peran penting dalam upaya meminimalisir resiko banjir Pemkot Malang melakukan normalisasi saluran air. Dalam hal ini kegiatan pengerukan saluran air merupakan upaya jangka pendek yang dapat

dilakukan untuk bisa meminimalisir terjadinya banjir di kawasan yang sering kali dilanda banjir akibat adanya curah hujan yang tinggi. Upaya pencegahan banjir ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak yang ada di kota Malang dan harus dilakukan secara bertahap demi bisa meminimalisir terjadinya banjir. Maka, untuk bisa mewujudkan strategi ini keterlibatan masyarakat dan pihak swasta tentunya akan sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan permasalahan banjir. Maka dari itu, gerakan bersih-bersih terhadap saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan harus dimulai dari lingkungan yang ada di kawasan wilayah masing-masing agar strategi meminimalisir terjadinya banjir dapat terwujud. Maka, Masyarakat pemerintah., dan pihak swasta harus bisa bergotong royong dalam melakukan penanggulangan bencana banjir ini.

Risiko kerugian tinggi karena potensi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan kehilangan bangunan dan prasarana umum. Saat ini, untuk menyelamatkan penduduk asli, ada usulan untuk tidak membangun rumah di daerah sungai. Selain itu, lebih selektif dalam menentukan pohon atau kayu, membangun pintu air, membuat hutan bakau, tetapi jika proyek tersebut dilaksanakan dengan komunitas yang kuat, maka keterlibatan sebagian besar masyarakat Kota Malang akan terimplementasi. Meskipun beberapa individu di Kota Malang sudah terbiasa dengan metode pencegahan banjir, masih ada upaya terbatas yang dilakukan beberapa daerah untuk memfasilitasi inisiatif pengendalian banjir yang diupayakan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang perlu waspada sekaligus memperkuat aset yang ada. Sumber daya organisasi adalah aspek pembangunan infrastruktur, fasilitas dan sistem yang memastikan

keberlangsungan hidup organisasi yang bergantung pada sumber daya manusia yang merupakan pondasi utama. Pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai melalui penggunaan alat dan sistem. Oleh karena itu, fokusnya harus pada peningkatan aaset sektor publik. Oleh karena itu, dengan adanya potensi banjir di Kota Malang, maka perlu kiranya dikaji ulang konsep kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Adanya kewenangan pengendalian banjir memungkinkan setiap penerima manfaat memiliki peran yang kuat dalam kontribusi. Oleh karena itu, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan maka peneliti ingin melakukan pendalaman dan meneliti “*Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang adalah lokasi yang menarik untuk dijadikan objek penelitian mengenai penyelenggaraan *collaborative governance* dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang, karena berdasarkan informasi dan observasi di lapangan ditemukan beberapa kasus mengenai bagaimana penyelenggaraan *collaborative governance* dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang ini mengalami beberapa kendala yang diantaranya sebagai berikut :

Pertama, permasalahan mengenai kurangnya dana. Keterbatasan dana menjadi kendala pertama dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan potensi banjir di Kota Malang. Pelaksanaan *collaborative governance* dalam menanggulangi banjir ini membutuhkan dana yang cukup namun, anggota komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengatakan, penanganan banjir di Kota Malang harus

tersusun secara berencana. Sebab, katanya, tidak cukup hanya dengan pengadaan (sarpras) sarana dan prasarana. (Radar Malang,2023)

Kedua, isu mengenai kecenderungan individualis masing-masing peserta. Perencanaan kota merupakan masalah lain dalam pengelolaan banjir di Kota Malang. Memburuknya infrastruktur antar stakeholder berkontribusi terhadap masalah perubahan iklim sehingga menyebabkan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan banjir. Permasalahan banjir di Kota Malang tidak hanya terbatas pada lumpur dan banjir, tetapi ruang juga menjadi perhatian. Pola tata ruang yang digambarkan abstrak menjadi penyebab Kota Malang masing kekurangan ruang terbuka hijau, khususnya kawasan konservasi yang mempunyai daya serap air yang cukup (Galank vijanarki, 2019)

Ketiga, permasalahan mengenai kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan penyumbatan akibat sampah. Dicontohkan , di Jalan Raya Langsep yang tergenang itu, akibat dari penumpukan sampah plastik dan botol yang terpantau di belakang Mall Dieng, karena memang limpahan airnya ke Jalan Langsep. Menurut (Yocky, 2024) kondisi di Jalan Langsep memang ada penyekatan, seperti jaring sampah. Tapi kondisi sampah yang banyak tidak mampu ditahan, sehingga aliran air pun meluber. (Malang Post,2024)

Maka dari itu berdasarkan beberapa temuan dari uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengemukakannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui dan menggambarkan *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang.
2. Untuk dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Potensi Banjir Di Kota Malang.

## D. Manfaat Penelitian

Setiap melakukan penelitian hendaknya ada suatu manfaat yang bisa diambil baik secara teoritis maupun praktis sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang maupun jangka pendek terhadap instansi maupun masyarakat.

1. Manfaat bagi teoritis
  - a. Bagi pembaca, penelitian ini

Bagi pembaca, penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi penelitian dalam bahasan yang sama.

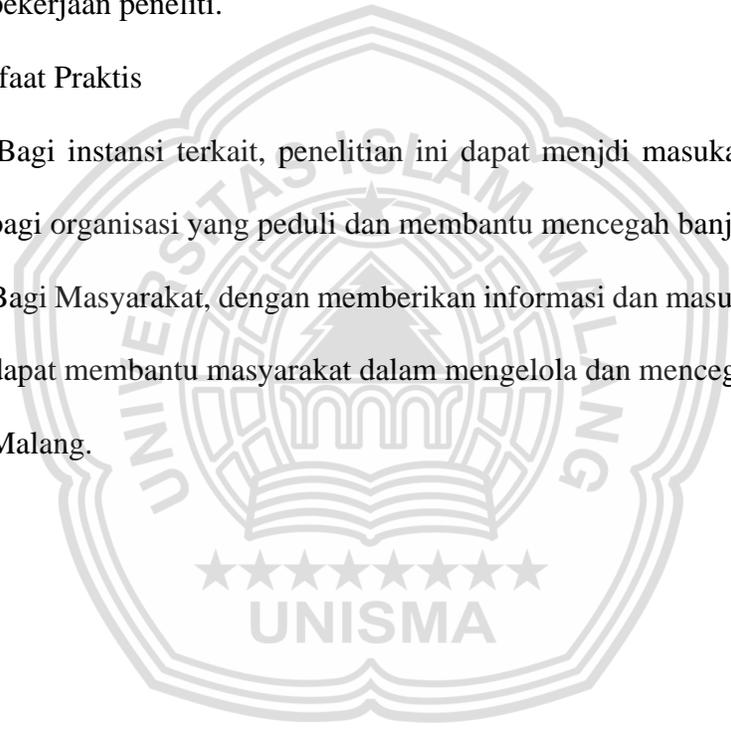
b. Bagi peneliti

Informasi tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan manfaat dari pengetahuan kampus dan memberikan dampak yang baik pada pekerjaan peneliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi organisasi yang peduli dan membantu mencegah banjir.

b. Bagi Masyarakat, dengan memberikan informasi dan masukan penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan mencegah banjir di Kota Malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Maka berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, maka peneliti bisa menarik kesimpulan tentang dalam penanggulangan banjir di Kota Malang tentunya sangat membantu dalam penanggulangan banjir, meskipun tidak berhasil sepenuhnya, tetapi bisa meminimalkan terhadap terjadinya banjir yang selalu melanda Kota Malang setiap tahunnya. Meskipun dalam proses *Collaborative Governance* masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi untuk bisa memaksimalkan penanggulangan banjir di Kota Malang.

Indikator yang digunakan untuk menjelaskan proses dalam penanggulangan bencana banjir menurut Ansell and Gash (2007) yakni sebagai berikut :

1. *Face to face dialog* yang merupakan dari pelaksanaan antara pemerintah BPBD Kota Malang dengan masyarakat Kota Malang. Pada indikator ini bisa dikatakan berhasil karena masyarakat dan pemerintah melakukan musyawarah bersama di kantor kelurahan di tiap masing-masing kelurahan di Kota Malang, serta menunjukkan bahwa pada indikator dialog tatap muka terdapat adanya pertemuan langsung antar *stakeholders* yang bersifat komunikasi multiarah

dalam melakukan strategi penanggulangan bencana banjir dengan menggunakan alarm dan CCTV sebagai alat pembantu dalam memantau situasi keadaan air saat terjadinya hujan.

2. Pada indikator membangun kepercayaan dalam proses menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat langsung dalam ini saling membangun rasa percaya ketika memulai berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuannya melaksanakan kolaborasi tersebut. Pihak BPBD sebagai pihak yang memfasilitasi setiap pembangunan fisik dan alat-alat yang dibutuhkan dalam penanggulangan banjir ini. Hal ini dibuktikan dengan peran masyarakat dan BPBD mengerjakan perannya masing-masing sebagai pemangku kepentingan yang harusnya menjadi modal awal dalam proses kerjasama dalam penanggulangan banjir di Kota Malang.
3. Pada indikator komitmen yaitu dengan menunjukkan adanya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam kolaborasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bisa komitmen yang dilakukan oleh kedua pihak berjalan dengan baik, karena pihak BPBD dan masyarakat juga saling membantu dan melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Dalam komitmen terhadap proses penyelenggaraan penanggulangan banjir ini bisa dikatakan berjalan dengan baik konsistensi dan tanggung jawab oleh setiap *stakeholders* yang dimana merupakan bentuk dari komitmen mereka.
1. Pada indikator berbagi pemahaman antara pemerintah dan masyarakat bisa dikatakan berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari adanya menyampaikan

informasi yang dilakukan sebagai strategi dan masukan di dalam melakukan perannya masing-masing di dalam melakukan proses penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Malang dengan melengkapi kekurangan satu dengan pihak lainnya. Kerjasama yang baik jika terjadi pada saat masyarakat memberikan sebagian lahan untuk dijadikan sebagai saluran air menuju sungai untuk mengurangi terjadinya genangan air.

2. *Intermediet outcome* dalam hasil sementara yang diperoleh dalam proses kolaborasi penanggulangan banjir di Kota Malang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan proses kolaborasi yang seharusnya melibatkan 3 pihak yang saling bekerja sama yakni pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta ternyata pada proses kolaborasi hanya melibatkan masyarakat dan pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya diadakan pertemuan tatap muka langsung antara aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan partisipatif, tidak hanya dua kali dalam sebulan agar terjalin kerjasama yang baik dalam memangau keamanan di Kota Malang.
2. Partisipasi pihak swasta seperti pemilik Restoran dan Hotel, tempat usaha dan toko di Kota Malang wajib memasang kamera CCTV di area publiknya untuk mendukung pelaksanaan penertiban di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan publik.

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Undang-Undang tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana yang merupakan realisasi dari Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapangaris sepadan sungai dan garis sempadan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan, Pasal 1 (1), Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 prinsip-prinsip pelaksanaan pelayanan publik

## Buku

Donahue, Jhon D & Richard J.Zeckhauser,2011 Collaborative Governance: Private Roles For Public Golas In Turbulent Times. New Jerset, pricenton university press. Purnomo, Hasi.(2010).Manajemen Bencana. Jakarta: PT. Buku Kita.

Hayat (2019), Sugiyono. 2010.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Hayat, (2017). Manajemen Pelayanan Publik, PT Raja Grafindo, Depok.

Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Intrans Publishing. Malang

at. (2019). Manajemen Pelayanan Publik. Depok: Rajagrafindo Persada. Diakses melalui iPusnas.

IDEP, 2007. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Edisi ke-2. Yayasan IDEP.

Jakarta : Rineka Cipta.

Kodoatie, Robert J. dan Hadimuljono, M. Basuki, 2005. Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air–UU RI No. 7 Tahun 2004. Penerbit Andi Yogyakarta.

Moleong, (2011). Dalam penelitian hayat (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahayu, Harkunti P, In In Wahdiny, Anin Utami dan Mardhiatul Asparini. 2009. Banjir dan Upaya Penanggulangannya. Bandung : Promise Indonesia.

Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*.

### Jurnal

Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta

Ansel, C.&A. Gash. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4),543-571

Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*. Volume; 543 571.

Benson, C. and Clay, E. J. (2004) 'Understanding the economic and financial impacts of natural disasters', *World Bank Disaster Risk Management Series*. doi: 10.1596/0-8213-5685-2.

Dibiyosaputro,P.1984. *Flood Susceptibility and Hazard Survey of The Kudus PrawataWelahan. Area, Cetral Java, Indonesia*. Thesis. ITC. Enschede. The Neteherlands

Galank Vijanarki, (2024) *Malang Rawan Banjir: Tata Ruang Problematik*. ITN Malang, 3 Januari.

H a y a t . ( 2 0 1 3 ) . *Profesionalitas dan Proporsionalitas: Pegawai Tidak Tetap dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik*. *Civil Service*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol.7 No. 2, Edisi November.

Hayat. (2014). *Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi; Aktualisasi Pemimpinan Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance*, *Jurnal Borneo Administrator* 10 (1) 59-84.

Indriyati dan Hayat. 2015. Peranan Perawat dalam Kerangka Kinerja Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan. *Jurnal Transformasi Administrasi* Vol. 4 No.1 Tahun 2015. Hal. 828-845.

Hayat (2019), Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.  
*Jurnal Dinamika Teknik Sipil*. Vol. 8: Hal. 162-169

Hayat, Slamet Muchsin, Muchamad Arif Wijayanto (2020) *Evaluasi Kebijakan Bencana Alam*. Penerbit: *Jurnal Respon Publik*. Vol. 14, Tahun 2020

Kodoatie R. J. dan Syarif R. 2013. *Pengelolaan Sumber daya Air Terpadu*. Andy, Yogyakarta

Kodoatie, R.J. dan Sugiyanto, 2002. *Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode*.

Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, hal 11

Mahmudan, (2023) Kota Malang Siapkan Rp 2 Triliun Untuk Tuntaskan Banjir. *Jawa Pos*, 9 April.

Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Yogyakarta. Alfabeta.

Penelitian Bayu A, Adam I, Nur H pada tahun 2023 yang “berjudul *Penggulagan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau*”.

Penelitian dari Hendra irawan umabaihi, Nurliah nurdin, Romli arsyad pada tahun 2022 dengan judul “ *Collaborative Governance Dalam Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula*”

Penelitian dari Nelvi Rahmadani pada tahun 2023 yang berjudul “*Collaborative*



*Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di kota Dumai*”.

Penelitian David andria, pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Penanggulangan Dampak Bencana Banjir di Kecamatan Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan”.

Pratomo, Agus Joko. 2008. Analisis Kerentanan Banjir Di Daerah Aliran Sungai Sengkarag Kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah Dengan Bantuan. Sistem Informasi Geografis.skripsi.Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.

Sebastian, Ligel. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir.

Wulan Indriyani, (2024) Sampah Tak Mampu Ditahan, Banjir Masih Terjadi di Kota Malang, 20 Februari.

